

KASTA DAN WARNA: SEBUAH KRITIK DALAM MASYARAKAT EGALITER

Oleh:

Ni Nengah Sudarsini

Anggota Vivekananda Yoga Sanstha

ABSTRACT:

The caste system is one of the foundations of the emergence of social problems in society. Indeed caste is one of the tactics of colonists in the Dutch colonial period that tried to influence and divide the unity and unity of Balinese society, making it easy to conquer. Actually known as Catur Warna, the goal is not to distinguish one group from another vertically, but because of the procession and ability of each individual. Here it is clear that warna is the name for people who master a particular field. If the society is not organized by warna, then there will be problems arising in social life. From this concept it is important to emphasize that everyone has the right to increase his or her dignity to be superior to others. All of warna have the opportunity to develop goodness for the sake of lofty ideals, this is the real principle of equality or egalitarianism. In a spiritual perspective, the real human existence is the identification or recognition of the self with the atma that in Hinduism involves the principle of yoga that God is in every human being, therefore, the principle of Godhead in every being is the same. This means that God is in all beings so that there is unity in all of His creations.

Keywords: caste, warna, egalitarian society

I. PENDAHULUAN

Sebagian ajaran dan konsep-konsep dasar dalam kitab suci Weda menggambarkan kesetaraan dalam hubungannya dengan sesama manusia, namun di satu sisi ego yang meliputi individu seringkali memunculkan penafsiran yang keliru. Prestise dan kepentingan pribadi menyebabkan munculnya keinginan untuk dihargai dan dihormati sebagai yang paling tinggi derajatnya. Pandangan Hindu sebagai agama yang egaliter tenggelam dalam euforia kasta yang selama ini selalu dipandang sebagai tradisi bagi masyarakat. Kasta menjadi salah satu topik yang akan terus menggema seiring dengan perbandingan akan status sosial yang disandang berdasarkan kelahiran. Pelabelan kasta yang disalahgunakan oleh orang-orang jaman dahulu membentuk sebuah tradisi yang harus dijalankan oleh keturunannya. Sifat dan karakter umat Hindu yang selalu memegang teguh sesuatu yang dianggap sebagai tradisi warisan leluhur semakin memperkuat posisi kasta dan mengaburkan istilah

warna, sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini bahkan masa yang akan datang, kasta tetap memiliki porsi tersendiri dalam membedakan derajat seseorang.

Kondisi ini menggambarkan bahwa Hindu belum mampu sepenuhnya mewujudkan sikap egaliter yang telah tertuang dalam kitab suci Weda. Pemahaman tentang kasta yang keliru memperbesar ketidakharmonisan dalam hubungan *menyama braya*. Kasta merupakan salah satu penentangan dari prinsip humanisme, bahkan Wiana (1993: 18) menyebutnya sebagai produk sosial historis dan stratifikasi masyarakat khususnya yang terjadi lebih dahulu di India pada zaman lampau yang membedakan harkat dan martabat manusia berdasarkan keturunan. India yang menjadi asal munculnya agama Hindu juga telah lebih dahulu mengalami tantangan cukup berat dengan sistem kasta yang membentuk masyarakat menjadi terhirarkis dan jauh dari kesan egaliter. Implikasi yang terjadi tidak serta merta mengembalikan kesadaran, karena sistem kasta dianggap sebagai

upaya untuk mempertahankan kemurnian persaudaraan bahkan menjadi keuntungan atas sekelompok orang.

Umat Hindu khususnya di Bali, sampai saat ini masih tetap memberlakukan sistem kasta yang sebenarnya merupakan salah satu dasar munculnya permasalahan sosial di masyarakat. Sesungguhnya kasta merupakan salah satu taktik dari penjajah pada masa kolonial Belanda yang mencoba untuk mempengaruhi dan memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Bali, sehingga mudah untuk ditaklukan. Baher (2012) menyebutnya sebagai politik *divide et impera* (politik adu domba). Hampir di semua daerah di Bali pernah merasakan panasnya konflik kasta tersebut bahkan bernuansa kekerasan dan pengrusakan. Mulai dari Konflik Kasta di Seseetan Denpasar (1980), Konflik Kasta di Selemadeg Tabanan (2005), Konflik Kasta di Desa Tampak Siring Gianyar (2006), Konflik Kasta di Desa Manggis Karangasem (2006) dan Konflik Kasta di Desa Tusan Klungkung (2007). Selain itu, kasus yang seringkali dijumpai dalam masyarakat adalah perkawinan luar kasta, walaupun saat ini sedikitnya sudah mulai diterima oleh masyarakat. Contoh paling nyata pernah dituliskan oleh sastrawan asal Bali, Oka Rusmini dalam Tarian Bumi karya, yaitu cerita perkawinan Ida Ayu Telaga dengan lelaki yang dianggap berasal dari kalangan sudra, yaitu Wayan Sasmita. Pihak lelaki ditentang oleh keluarga griya, sehingga Telaga harus menjalani upacara patiwangi dan harus keluar dari griya. Kisah ini memperlihatkan bagaimana kesadaran tentang kasta itu masih kental (Wasono, 2011: 202-203).

Beberapa akademisi serta tokoh adat memberikan pandangan tentang tingkatan tersebut yang bukan dipandang berdasarkan kelahiran, namun profesi dan kemampuan. Hal ini merupakan sebuah prestasi atau pencapaian leluhur di jaman dahulu, dimana yang berkedudukan sebagai pendeta merupakan golongan *Brahmana*, sedangkan para Raja atau yang duduk di tampuk pemerintahan dianggap sebagai *ksatria*, begitupula dengan *waisya* dan *sudra* yang memiliki tugas sebagai pedagang dan pelayan dari ketiga jabatan di atas. Sistem warna

ini lah yang seharusnya diturunkan kepada anak cucunya karena sesuai dengan ajaran dalam Veda. Penggambaran keempat warna ini bahkan telah ada pada zaman Veda, Brahmana dan Upanisad namun menjadi bias seiring perkembangan jaman ketika sekelompok kepentingan tersebut masuk di dalamnya.

Apabila melihat dari dua sudut pandang, perbedaan tinggi dan rendah berdasarkan keturunan sesungguhnya dikatakan sebagai hal yang wajar jika dilihat dari segi fisik atau material. Konsep putih ada karena hitam, suatu benda dikatakan tinggi ketika berhadapan dengan yang pendek. Konsep *maya* ini memang berjalan sedemikian, namun tidak hanya fisik, yang lebih penting adalah seseorang mampu melihat esensi dari kedua aspek tersebut. Manusia satu dengan yang lainnya terlahir sama dari *atman* yang merupakan ciptaan Tuhan. Tidak ada yang membedakan *atman* yang satu dengan yang lainnya, perbedaan hanya muncul dari karma yang dijalani masing-masing individu. Jadi, semua hanya masalah sudut pandang serta seberapa besar ego dalam diri manusia mempengaruhi akal pikirnya. Kesetaraan akan muncul apabila manusia menganggap dirinya sama dengan yang lain terlepas dari label simbolik pada namanya. Perkembangan dan kemajuan pendidikan diharapkan dapat mengubah pandangan dan akal pikir manusia, sehingga dalam tataran tersebut mereka mampu secara kritis memahami kekeliruan yang selama ini berakar dan mendarah daging dalam diri masing-masing individu. Ketika tataran kesadaran ini menguat dan mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka apapun yang terlihat memiliki kedudukan yang sama secara horizontal, tanpa adanya pengkotak-kotakan secara vertikal.

II. PEMBAHASAN

2.1 Catur Warna dalam Kitab Suci Hindu Kaitannya dengan Egalitarianisme

Konsep catur warna yang disusun oleh Para Maharsi melalui wahyu dari Tuhan yang dituangkan dalam kitab suci Veda. Catur warna menjadi konsep dalam agama Hindu tujuannya bukan untuk membedakan golongan yang satu

dengan yang lain secara vertikal, melainkan munculnya istilah warna disebabkan oleh prosesi dan kemampuan setiap individu. Tuhan menyebutnya *Brahmana* karena ia adalah yang terpelajar, *ksatrya* mempunyai kemampuan pemimpin, *vaisya* bergelut dibidang ekonomi dan *sudra* pelayan dari ketiga warna yang telah disebutkan sebelumnya. Disini jelas bahwa warna adalah sebutan bagi orang yang menguasai bidang tertentu. Jika tidak disusun golongan masyarakat berdasarkan warna maka akan ada pembiasan makna dalam kehidupan sosial. Dari konsep ini penting dipertegas bahwa setiap orang berhak meningkatkan harkat dan martabatnya untuk menjadi lebih unggul dari yang lainnya, maka semua warna berkesempatan mengembangkan kebaikan demi cita-cita luhur. Inilah prinsip kesetaraan yang sesungguhnya yaitu setiap orang berhak untuk berjuang meraih cita-citanya. Apabila prinsip egalitarian diartikan sebagai semua warna yang sama kedudukannya dalam status sosial itu berarti ada kekeliruan dalam memahami egalitarianisme, karena jika demikian akan mematikan motivasi setiap individu untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Maka egalitarianisme dalam catur warna harus dipahami dari perspektif hak setiap warna yang memiliki kesempatan yang sama, bahkan Sri Krishna bersabda dalam Bhagavad Gita IV.13, menyebutkan bahwa seharusnya cita-cita luhur pencari kebenaran adalah melampaui catur warna sebagaimana yang diungkapkan dalam sloka di bawah ini :

catur-varnyam maya srstamguna-karma-vibhagasah

tasya kartaram api mamviddhy akartaram avyayam

Terjemahannya :

Menurut tiga sifat alam dan pekerjaan yang ada hubungannya dengan sifat-sifat itu, empat bagian masyarakat diciptakan oleh-Ku. Walaupun akulah yang menciptakan sistem ini. Hendaknya engkau mengetahui bahwa aku tetap sebagai yang tidak berbuat karena aku tidak dapat diubah (Bhaktivedanta, 2006:234)

Jadi, konsep catur warna telah ada dalam kitab suci Veda dan memiliki kedudukan serta posisi yang kuat sebagai penghargaan atas pencapaian dalam bidang yang ada di dalamnya dan yang lebih penting tujuan terlahir menjadi manusia untuk meresapi sifat-sifat *Ilahi* sehingga catur warna pun harus ditanggalkan sebagai manusia ideal untuk menyatu dengan Tuhan. Maka jelas bahwa dalam Hindu tidak mengenal kasta melainkan warna sebagai tahapan pembebasan. Jika ditelusuri kasta dan warna memiliki pengertian yang sangat berbeda. Dr W. Durant dalam Sudharta (2003: 204) menyebutkan bahwa kasta tidak berasal dari bahasa Sansekerta tetapi dari bahasa portugis '*casta*' yang diambil dari bahasa latin *castus* yang berarti suci atau dengan istilah yang sama menyebutkan sebagai tingkatan-tingkatan. Kasta bersifat vertikal yang menilai posisi tinggi dan rendah, sedangkan catur warna bersifat horizontal dengan derajat sama, bahkan menurut Bhisama PHDI, Catur warna adalah ajaran agama Hindu tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat atas '*guna*' dan '*karma*' dan tidak terkait dengan kasta atau wangsa.

Beberapa naskah Hindu lainnya yang menyebutkan tentang warna, terdapat dalam Reg Weda (X.90.12), Yajurveda (XXV.2), Yajurveda (XXX.5), Yajurveda (XXX.11), Yajurveda (XVIII.48), Yajur Weda (XVIII. 38), Yajur Weda (XXXI.II), Bhagavadgita (XVIII.41), Manawa Dharmasastra (X.4), Sarasamuccaya sloka 55, Sarasamuccaya sloka 58, Sarasamuccaya sloka 57, Sarasamuccaya sloka 59 dan Sarasamuccaya sloka 60. Bahkan kitab seperti itihasa juga mencantumkan catur warna, salah satunya dalam Mahabharata (XII.CCCXII,108) yang menyatakan bahwa ke-*Dvijati*-an seseorang tidak ditentukan oleh ke-*wangsa*-annya (*nayonih*), namun yang menentukan adalah perbuatannya yang luhur dan pekerjaannya yang memberi bimbingan rohani kepada masyarakat. Dari berbagai sloka tersebut, salah satu yang semakin mempertegas kedudukan warna di masyarakat diungkapkan dalam untaian Yajur Veda berikut :

Brahmane Brahmanam, Kshtariya Rajanyam, Marudbhyo Vaishyam, Tapase Sudram (Yajur Veda, XXX.5)

Terjemahannya :

Tuhan telah menciptakan Brahmana untuk pengetahuan, Ksatria untuk perlindungan, Vaishya untuk perdagangan dan Sudra untuk pekerjaan jasmani

Konsep ini menjelaskan secara tegas konsep catur warna yang berdasarkan atas profesi atau kemampuan, namun pertanyaan lain muncul yang justru menyamakan warna dengan kasta. Seseorang memandang bahwa pembagian dari segi profesi dianggap tidak jauh berbeda dengan sistem kasta, yaitu sama-sama mengklasifikasikan seseorang dalam kelompok yang berbeda. Sekali lagi, pengklasifikasian dalam catur warna sesungguhnya bukan bertujuan untuk membentuk masyarakat terkotak-kotakan secara vertikal, namun menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki sifat, karakter dan potensi yang beda satu dengan yang lain, namun dalam koridor yang sama secara horizontal yaitu manusia sebagai ciptaan Tuhan.

Seseorang yang berprofesi sebagai guru yang dalam kasta dikatakan sebagai golongan *sudra*, namun dalam arti yang sesungguhnya merupakan *Brahmana* (dalam warna). Kecerdasan dan kemampuan yang dimiliki seseorang tidak terpengaruh oleh ikatan nama yang melekat pada dirinya. Ketika tokoh agama muncul di tengah masyarakat, rasa hormat yang dalam ditunjukkan karena jasa dan pengetahuannya, terlepas dari label simbolik yang dimiliki. Pendidikan yang semakin maju, sedikit demi sedikit merubah pandangan umat akan sistem warna, walaupun belum menyentuh total masyarakat secara keseluruhan. Salah satu cerita tentang Sankaracharya dan Chandala menjadi contoh penyadaran akan HAM, kesetaraan dan humanisme yang saat ini menjadi salah satu wacana nasional.

Ananda dalam tulisannya berkenaan dengan egalitarian menceritakan sebuah kisah seorang Acharya yang sedang berjalan-jalan dengan muridnya. Suatu ketika, Beliau bertemu dengan seorang chandala. Murid tersebut segera mencegah agar sang guru tidak melihat si chandala. Pengusiran yang dilakukan murid-muridnya membuat chandala merasa kecewa dan berkata, “Hei orang bijak, Anda mengajarkan

tentang Filsafat Advaita yang menerangkan bahwa semua ini adalah *mayaya/mithya*, hanya *Brahman*-lah yang ada. Lalu siapa kau yang telah menyuruh *atma*-ku untuk pergi, yg sebenarnya adalah *Brahman* atau badanku yg sebenarnya adalah maya?”. Sang Acarya terkejut dan segera bersujud di depan chandala yang kemudian disebut sebagai guru. Acarya tersebut tidak lain adalah Sankaracharya, seorang guru besar yang dihormati, sedangkan chandala jika diterjemahkan merupakan arti dari sesuatu yang hina atau rendah. Catur warna tidak akan mendapat ruang cukup luas dalam masyarakat apabila di hati mereka masih memandang rendah orang lain, terlebih karena gelar nama yang dimiliki.

2.2 Prinsip-Prinsip Kesetaraan dalam Hindu

a. Ideologi *Tat Twam Asi* dan *Vasudaiva Kutumbhakam*

Dua konsep dasar ini sudah menjadi wacana umum dalam masyarakat. Dilihat dari pengertiannya, *Tat Twam Asi* mengajarkan sebuah pandangan bahwa setiap manusia sama, berasal dari pencipta yang sama dan memiliki atman yang sama pula. Setia (1993: 58-59) mengungkapkan bahwa dalam *Tat Twam Asi* terkandung nilai solidaritas yang tinggi serta toleransi yang menimbulkan rasa persaudaraan dan kerukunan hidup antar sesama manusia serta mewarnai tata susila masyarakat Bali, seperti: *Tresna Asih*, *Anresangsia*, *Catur Paramitha*, *Tri Kaya Parisudha* dan *Yadnya*. Suacana dalam tulisannya berjudul Nilai-nilai dan Parameter Demokrasi, mengutarakan bahwa hakikat *Tat Twam Asi* pada akhirnya bermuara dari kasih sayang yang diaktualisasikan ke dalam bentuk sikap egaliter, yaitu memandang segala makhluk adalah sama. Sikap egaliter ini pula dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dirumuskan dan dikemas ke dalam konsep “musyawarah-mufakat” sebagai inti dari Demokrasi Pancasila.

Makna yang serupa juga dinyatakan dalam konsep *Vasudaiva Kutumbhakam*. Dari segi fisik, sosial, materi serta jalan kehidupan berbeda antara manusia yang satu dengan lainnya. Namun, jika kembali pada esensinya sebagai manusia, segala perbedaan itu tidak menjadi ukuran. Suwantana (2011: 6) menambahkan

bahwa Vedanta menyatakan tidak ada perbedaan kasta, karena semua sama. Hal ini dipertegas oleh Sankaracharya bahwa ‘tidak ada’ perbedaan antara orang hebat seperti Vamadeva dan orang loyo di jaman sekarang ini, sepanjang kapasitas inheren yang ada pada diri setiap manusia (*atman*), realisasi diri sebagai *concern*. Berbagai perbedaan yang muncul adalah sebuah keharusan, seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan catur warna sebelumnya bahwa hitam dan putih atau kaya dan miskin adalah hal yang wajar terjadi, namun persamaan yang dimaksud dalam Vedanta adalah akal pikir. Seseorang yang berpikir bahwa semua makhluk sama secara esensi, maka ia dapat menghormati yang lain. Egalitarianisme yang selama ini dirasakan sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mungkin apabila pandangan *Tat Twam Asi* dan *Vasudaiva Kutumbhakam* menyerap dalam akal pikirnya.

b. Kitab Purusha Sukta dan Kitab Sruti tentang Egaliter

Pada buku *Vedic Equality And Hinduism* dalam Ananda dikatakan bahwa mantra-mantra Veda sebagai wahyu Tuhan (*Sruti*) secara normatif mengandung konsep-konsep yang sangat egaliter, tetapi dipersepsikan sesuai konteks historisnya, seperti berbagai tafsir terhadap Purusha Sukta (X.90.11&12) salah satunya yaitu ‘jika sebuah masyarakat ingin bangkit seperti halnya Virat Purusha jika kecerdasannya (kaum *Brahmana*), pemerintahannya (Kaum *Ksatria*), pengusaha (*Vaisya*) dan para profesionalisme bekerjasama dengan baik secara harmonis, seperti halnya mulut, tangan, kaki pada seseorang yang sehat’. Purusha Sukta seperti pada sloka di atas menekankan kesetaraan total, persatuan yang sempurna dan saling melengkapi di antara keempat kelas (*Brahmana*, *Ksatria*, *Waisya* dan *Sudra*) untuk menciptakan masyarakat yang kuat. Begitupula dalam Rg. Veda (V.60.5) yang menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang lebih tinggi (*ajyestasa*) atau lebih rendah (*akanishtasa*), semua bersaudara (*ete bhrataraha*). Semua harus berjuang untuk kepentingan bersama dan maju bersama-sama (*sowbhagaya sam va vriduhu*) (Gupta,2006:248). Terdapat pula sloka lainnya yang membahas tentang kesetaraan dan kesatuan:

Rg Veda (V.60.5), Rg Veda (VIII.93.13), Rg Veda (X.93.9), Rg Veda (X.191.2-4), Atharva Veda (III.30.1-7), Atharva Veda (VI.64.1-3), Atharva Veda (73.1-3), Atharva Veda (VI.74.1-3), Atharva Veda (VII.54.1-2), Atharva Veda (VII.52), Yajur Veda (19.46), Yajur Veda (26.02), Yajur Veda (36.18).

2.3 Nilai-Nilai Egalitarianisme Hindu dalam Kehidupan Sosial

Hindu sebagai agama yang mengedepankan etika keselarasan egalitarianisme dalam kehidupan bukan lagi menjadi hal baru. Sejak jaman Veda, egalitarianisme telah dituliskan dalam teks-teks Veda. Prinsip egaliter dalam kehidupan benar-benar diaplikasikan dalam berbagai situasi sosial, baik di dunia seni, politik dan keagamaan. Hal-hal yang patut dihindari adalah jika terjadi kepentingan politik kekuasaan yang menyebabkan agama terjebak dalam arus besar politik sehingga akibatnya umat akan mengalami kebingungan. Agama akan terseret dalam ranah praktis-pragmatis dan melupakan dimensi universalitas, netralitas dan egalitarianitas. Pada akhirnya, fenomena luruhnya spirit universalitas dan egalitarianisme akan terlihat dalam perilaku kehidupan beragama dikarenakan pengaruh-pengaruh yang menyesatkan dari kepentingan pada bidang tertentu. Dalam hal ini, prinsip kesamaan dan kesejajaran akan terganggu, strata sosial-politik menjadi luruh tergantikan oleh prinsip eksklusifitas yang meninggikan status pribadi atau komunitas.

Ajaran universal Hindu adalah mendudukan manusia pada posisi yang sejajar atau egaliter. Sebagaimana pelaksanaan ajaran *tat tvam asi* atau *vasudaiva kutumbhakam* sebagai prinsip utama dalam membangun persaudaraan umat manusia yang bermakna tidak membedakan status sosial yang lebih tinggi atau lebih rendah, bahwasannya semua manusia adalah anak-anak Tuhan yang memiliki kedudukan yang sama. Dilihat dari dimensi ritual-keagamaan dan dimensi sosial-kemasyarakatan, ajaran Hindu di Bali merupakan simbol egalitarianisme, lambang persaudaraan, kesatuan dan persamaan manusia. Para umat dalam melaksanakan fungsi sosial telah melupakan dan menanggalkan egosentris seperti

pangkat, gelar, kedudukan, status sosial, kekayaan, jenis kelamin, ras, etnis dan kebangsaan. Inilah fakta yang terjadi, melalui kokohnya bingkai organisasi tradisional atau banjar di Bali, mereka bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama dalam mempertahankan adat tradisi dan budaya. Egalitarianisme dalam Hindu akan membangun implikasi kehidupan sosial yang kuat dan hangat. Kesetaraan sosial dalam kehidupan mampu menggempur pergolakan sosial dan degradasi yang timbul. Egalitarianisme mengajarkan kesetaraan sosial dan penghapusan stratifikasi derajat sosial.

2.4 Egalitarianisme Menyentuh Dimensi Spiritual Hindu

Keberadaan manusia yang sesungguhnya adalah identifikasi atau pengenalan diri dengan atma yang dalam ajaran Hindu meliputi prinsip yoga yaitu Tuhan berada dalam diri setiap manusia, oleh sebab itu, prinsip ke-Tuhan-an pada setiap makhluk adalah sama. Hal ini berarti bahwa Tuhan ada di dalam semua makhluk sehingga terdapat kesatuan dalam semua ciptaan-Nya. Ajaran ini juga sangat meyakinkan bahwa egalitarianisme tidak terbatas hanya pada kesetaraan sosial melainkan dimensi spiritual Hindu yang sangat menjunjung nilai-nilai tersebut, namun di satu sisi akibat selubung ego, setiap manusia mengidentifikasi prinsip ke-Tuhan-an yang berbeda-beda. Perbedaan ini sangat bervariasi tergantung dari kadar ke-ego-an yang menyelubunginya. Semakin tinggi ego, maka akan semakin rendah dan terbatas dalam mengidentifikasikan prinsip-prinsip ke-Tuhan-an dalam dirinya. Ego sebagai pembatas yang mengkotak-kotakan manusia dalam kehidupan. Ego sangat identik dengan kecerdasan intelektual, saat intelek berkembang dalam diri seseorang, terkadang digunakan untuk menghegemoni orang lain atau membuat persepsi-persepsi untuk menguasai orang lain. Tindakan ini telah dilakukan dan terjadi di segala bidang kehidupan manusia, termasuk bidang keagamaan yang sering kali disalahgunakan untuk menghegemoni orang lain sehingga munculah anggapan non egalitarianisme.

Bagi orang-orang yang telah diberkahi kesadaran *atman* akan selalu mengupayakan sifat-sifat murni melihat semua sama karena sifat murni

mengantarkan pada pencapaian pembebasan diri dari belenggu perbedaan persepsi sebagaimana yang tersirat dalam sloka kitab Bhagawadgita berikut:

Sattwam sukhe sanjayati, rajah karmani bhārata,

jnānam āvṛtya tu tamah, pramāde sanjayaty uta” (Bhagawadgita, XIV. 9)

Terjemahannya:

Wahai putra Bharata, sifat kebaikan mengikat seseorang pada kebahagiaan, nafsu mengikat dirinya pada kegiatan yang dimaksudkan untuk membuahkan hasil atau pahala, dan kebodohan yang menutupi pengetahuannya mengikat dirinya pada kegilaan (Bhaktivedanta, 2006: 686).

Usaha yang harus dilakukan oleh setiap manusia di dalam kehidupan ini adalah membebaskan diri dari pengaruh *Tri Guna* (tiga sifat). Pembebasan ini diawali dengan terlebih dahulu mengatasi kedua guna (sifat) yang lebih rendah yaitu *rajas* dan *tamas*, karena sebelum kedua guna (sifat) itu ditaklukan, sulit untuk meraih *sattwam* yaitu guna (sifat) yang mengantarkan pencerahan, namun meskipun demikian *sattwa guna* harus tetap menjadi alat karena sifatnya juga dapat mengikat. Konsep ajaran Hindu menguraikan bagi seseorang yang telah terbebas dari ikatan ketiga *guna* akan mencapai pembebasan yang kekal abadi yang disebut *Nirguna* yaitu tanpa *guna* (sifat). Sementara dalam istilah yoga disebut *kaivalya*. Pada istilah *Vedanta*, keadaan ini disebut *nirguna* (sifat) *Brahman* (Tuhan tanpa wujud) dan *saguna Brahman* (Tuhan yang diwujudkan). Tuhan dalam keadaan tanpa sifat (*Nirguna*) atau *Sunya*) adalah istilah yang dipergunakan untuk memahami hakikat Tuhan dalam keadaan hukumnya semula. Ilmu filsafat menyatakan ini sebagai keadaan *Transendental*, sesuatu diluar dari lingkaran kemampuan pikiran manusia. Jika sang jiwa bangkit tidak ada lagi sekat-sekat perbedaan yang ada adalah kemanggulan dalam setiap makhluk, seseorang tidak lagi berpihak pada kebaikan atau pun keburukan melainkan dibalik dualitas ada kebahagiaan sejati atau *anandam*. Keadaan ini diuraikan dalam Bhagawadgita pada

sloka berikut:

*Brahmabhûtah prasannâtmâ, na sochati
na kâñkshati,
samah sarveshu bhûteshu, madbhaktim
labhate param* (Bhagawadgita, XVIII. 54)

Terjemahannya:

Orang yang mantap secara rohani seperti itu, segera menginsafi *Brahman* yang paling utama dan menjadi riang sepenuhnya. Ia tidak pernah menyesal atau ingin mendapatkan sesuatu. Ia bersikap yang sama terhadap sesuatu makhluk hidup. Dalam keadaan itulah ia mencapai bhakti yang murni kepada-Ku (Bhaktivedanta, 2006:829).

Sloka tersebut menguraikan bahwa kesadaran seseorang yang egaliter adalah menginsafi semua perbedaan yang nampak karena ilusi dari perbedaan yang ada baginya adalah penyatuan dan kesatuan tanpa sekat-sekat apapun serta memiliki sifat cinta kasih kepada semua makhluk di dunia ini. Dikatakan pula bahwa pada umumnya orang-orang yang demikian itu memiliki sifat-sifat kreatif, berani, sederhana, rendah hati, tidak banyak keinginan, terbebas dari rasa takut dan kekhawatiran. Mereka juga ahli dalam menganalisa, dapat membedakan dengan tepat sehingga selalu tepat pula dalam menetapkan pilihannya, renungan-renungannya mendalam sehingga melupakan dirinya sendiri. Hidupnya spontan dan sederhana seperti anak kecil yang berjiwa bersih. Maslow dalam Anandamitra, (2002: 23) menemukan bahwa kebanyakan individu-individu yang luar biasa ini sangat tercurah perhatiannya pada masalah yang ditangani dan mengabdikan keyakinan jiwa raganya kepada kewajiban ideal, terjun ke dalam suatu misi yang menurut keyakinannya adalah orang yang terpilih untuk melaksanakannya. Dengan kegiatan yang dilakukan itu, mereka merasa sudah mempersembahkan dirinya

III. PENUTUP

Berbagai perbedaan yang muncul adalah sebuah keharusan, seperti yang telah diungkapkan pada pembahasan catur warna. Perbedaan adalah hal yang wajar terjadi, namun persamaan yang

harus dibangun melalui akal pikir. Seseorang yang berpikir bahwa semua makhluk sama secara esensi, maka ia dapat menghormati yang lain. Egalitarianisme yang selama ini dirasakan sulit untuk diwujudkan dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mungkin apabila pandangan *Tat Twam Asi* dan *Vasudaiva Kutumbhakam* menyerap dalam akal pikir. Membangun kesadaran seseorang yang egaliter adalah menginsafi semua perbedaan yang nampak karena ilusi dari perbedaan yang ada baginya adalah penyatuan dan kesatuan tanpa sekat-sekat apapun serta memiliki sifat cinta kasih kepada semua makhluk di dunia ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anandamitra, Avadhutika. 2002. *Yoga Untuk Kesehatan*. Jakarta: Ananda Marga Publication
- Ananda, I Nyoman. *Egalitarianisme dalam Hindu*. Dalam: <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=117615&val=5418>. Diakses: 27-02-2018
- Baher, Dimas. 2012. *Pelapisan Sosial Persamaan Derajat*. Dalam <http://dimasbaher.wordpress.com/2012/11/12/pelapisan-sosial-persamaan-derajat/>. Diakses: 25-02-2018
- Bhaktivedanta, Sri Prabhupada, 2006. *Bhagawad-gita Menurut Aslinya*. Denpasar: Yayasan Hare Krishna
- Gupta, O.P. 2006. *Vedic Equality and Hinduism*. Delhi: New Age Books
- Rahardjo, M. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah, dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES
- Setia, Putu. 1993. *Suara Kaum Muda Hindu*. Jakarta: Yayasan Dharma Nusantara FCHI
- Tim Penyusun. 2002. *Bhisama Sabha Pandita PHDI Pusat Tentang Pengamalan Catur Warna*. Denpasar
- Wasono, Sunu. 2011. *Kasta dan Pariwisata: Dua Persoalan di Balik Pesona Bali*. Pada Jurnal UNEJ Volume 1 dalam <http://jurnal.unej.ac.id>. Diakses: 25-02-2018
- Wiana, Kt dan Raka Santeri, 1993. *Kasta dalam*